ABSTRAK

Pada tahun 2018, Vietnam ditetapkan sebagai negara peringkat 1 se-Asia Tenggara yang memiliki tingkat *bride trafficking* tertinggi. Masih pada tahun yang sama, Vietnam juga masuk ke deretan 10 besar negara di dunia yang penduduk perempuannya banyak terlibat dalam aktivitas *bride trafficking*. Mayoritas *bride* Vietnam dikirim ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan laki-laki disana. Padahal di sisi lain, pemerintah Vietnam sejatinya telah melakukan berbagai upaya progresif untuk menyelesaikan permasalahan *bride trafficking*. Pemerintah membuat aturan hukum nasional mengenai anti-perdagangan perempuan, membentuk perjanjian dengan negara-negara lain di level subregional, regional, maupun internasional, bekerja sama dengan komunitas lokal, dan menguatkan sanksi hukum bagi pihak *trafficker*. Kontradiksi di atas pada akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan yaitu mengapa tingkat *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok masih tinggi sampai dengan tahun 2018, meski pemerintah Vietnam telah melakukan langkah-langkah progresif untuk mengatasi masalah tersebut. Guna menjawab pertanyaan itu, penulis mengelaborasikan konsep globalisasi, *transnational criminal organizations* (TCOs), budaya patriarki, dan *good governance*. Kemudian, penulis mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, tesis, serta *electronic sources* yakni artikel, dokumen resmi, dan berita. Penulis menemukan bahwa TCOs memiliki peran besar dalam melanggengkan aktivitas *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok. Di samping itu, penulis juga menjelaskan faktor-faktor lainnya yang melatarbelakangi tingginya tingkat *bride trafficking* Vietnam ke Tiongkok hingga tahun 2018 yakni "*the power of patriarchal culture*" di Vietnam dan ketidakmampuan negara dalam menerapkan *good governance* mengenai penanganan isu *bride trafficking*.

Kata-Kata Kunci: *Bride Trafficking*, Tiongkok, *Transnational Criminal Organizations* (TCOs), Vietnam

ABSTRACT

In 2018, Vietnam was declared as the number one country in all Southeast Asia that has the highest level of bride trafficking. Still in the same year, Vietnam also entered to the top ten states in the world that of which their female citizens involved in bride trafficking activity. The majority of Vietnam brides are sent to China to be married with local men. Whereas on the other hand, the Vietnamese government actually has done many progressive attempts on settling the problem of bride trafficking. The government made national regulatory law on anti-female trade; forming agreements with other states on sub-regional, regional, and international areas; working together with local communities; as well as improving legal sanctions towards traffickers. These contradictions in the end postulate a question on why does the Vietnam-China bride trafficking level is still high until 2018, despite the Vietnamese government has implemented progressive actions in settling the problem. In order to answer such question, the writer elaborated on the concepts of globalization, transnational criminal organizations

(TCOs), patriarchal culture, and good governance. Then, the writer collected data from books, journals, thesis, as well as electronic sources such as articles, official documents, and news. The writer found that TCOs has a big role in the continuance of Vietnam-China bride trafficking activity. Aside from that, the writer also explains other factors that become the background for the high level of bride trafficking from Vietnam to China in 2018, that is the power of patriarchal culture in Vietnam and inability for state in implementing good governance regarding the settlement of bride trafficking issue.

***Keywords**: Bride Trafficking, China, Transnational Crime Organizations (TCOs), Vietnam*